



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KESEHATAN


Jalan Pertanian No. - Telepon : 0766 - 8001006, website : disk.es.bengkalis.kab.go.id
BENGKALIS

Bengkalis, 30 Agustus 2022

Kepada Yth,
Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis
di –
Bengkalis

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 440/Diskes/SKRT/2022/.....

| No. | Jenis yang dikirim | Banyaknya | Keterangan |
|-----|---|--------------------|---|
| 1 | Tindak lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahu 2021 | 1 (Satu) Exampilar | Disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya |


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KESEHATAN
dr. ERSAN SAPUTRA. TH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740220 200312 1 007

Diterima tanggal :

Penerima :

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

| No | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | BUKTI DUKUNG |
|----------------------------|---|---|---|
| Perencanaan Kinerja | | | |
| 1 | Cascading yang telah disusun harus memuat upaya perbaikan penyalarsan sasaran yang lebih tinggi ke sasaran yang dibawahnya. | Melakukan Reviu dan Perbaikan Cascading (pohon kinerja) dengan menerapkan prinsip umum/teknis. | Cascading yang menggambarkan prinsip logis sebab akibat dalam pencapaian kinerja |
| 2 | Dokumen perencanaan kinerja dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan anggaran dan perorganisasian kegiatan. | Mengoptimalkan dokumen perencanaan kinerja dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan. | Dokumen Renja 2022 |
| 3 | IKU harus memenuhi kriteria SMART, yaitu Spesific, Measureable, Achievable, Relevan dan Timebound | Melakukan pemenuhan kriteria SMART, yaitu Spesific, Measureable, Achievable, Relevan dan Timebound. | SK Kepala Dinas nomor 024/kpts/l/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. |
| 4 | IKU mampu mengukur kinerja yang seharusnya dan jumlah cukup memadai untuk menyimpulkan tercapainya kondisi yang seharusnya. | Melakukan pengukuran kinerja sesuai IKU | Dokumen LAKIP 2021 |
| 5 | Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja menggambarkan kriteria dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis | Menetapkan target perencanaan kinerja yang dapat digambarkan sesuai kriteria yang ingin dicapai | Sedang dalam proses |
| Pengukuran Kinerja | | | |
| 6 | Menyusun SOP atau dokumen yang disamakan tentang teknis pengumpulan data kinerja. | Melakukan penyusunan SOP atau dokumen tentang teknis pengumpulan data kinerja | SOP Tentang Pengumpulan Data Kinerja |
| 7 | Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam pengukuran kinerja | Melakukan dokumentasi keterlibatan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam pengukuran kinerja. | Daftar Hadir dan Notulen Rapat |
| 8 | IKU dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. | Telah memanfaatkan IKU dalam penyusunan dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran. | Screenshoot RKA 2023 yang telah di upload dan memuat indikator yang selaras dengan IKU yang terdapat dalam Renja dan Renstra. |
| 8 | Melakukan monitoring terhadap target kinerja dan tidak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan | Melakukan monitoring terhadap target kinerja dan tidak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan | Sedang dalam proses |
| 9 | Memberikan reward dan punishment sesuai dengan hasil pengukuran kinerja | Merencanakan pemberian reward dan punishment sesuai dengan hasil pengukuran kinerja | Sedang dalam proses perbaikan |

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| 10 | Melakukan reviu IKU dan melakukan upaya perbaikan yang signifikan. | Melakukan reviu IKU dan melakukan upaya perbaikan yang signifikan. | Keputusan Kepala Dinas Kesehatan NOMOR : 024/Kpts/I/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten |
| 11 | Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. | Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. | Laporan Monev Pengukuran Kinerja TW I s/d TW 4 Dinkes 2021 |
| 12 | Menyusun data hasil pengukuran rencana aksi beserta tidaklanjutnya. | Menyusun data hasil pengukuran rencana aksi beserta tidaklanjutnya | Dokumen Rencana Aksi 2021 |
| Evaluasi Kinerja | | | |
| 13 | Melakukan dan mendokumentasikan evaluasi atas pelaksana rencana aksi | Melakukan dan mendokumentasikan evaluasi atas pelaksana rencana aksi | Sedang dalam proses |
| 14 | Melakukan pemantauan terhadap rencana aksi per triwulan dan digunakan untuk mengandalikan kinerja dan Menyusun alternatif perbaikan. | Melakukan pemantauan terhadap rencana aksi per triwulan dan digunakan untuk mengandalikan kinerja dan Menyusun alternatif perbaikan | Sedang dalam proses |
| 15 | Hasil evaluasi rencana aksi didokumentasikan, ditindaklanjuti dan dilakukan monitoring secara tertulis. | mendokumentasikan, menindaklanjuti dan memonitoring secara tertulis hasil evaluasi evaluasi rencana aksi | Sedang dalam proses |

Bengkalis, 26 Agustus 2022



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS**

dr. ERSAN SAPUTRA. TH

Pembina Utama Muda









NIP. 19740220 200312 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KESEHATAN**

| | |
|---|--|
| Nomor SOP | : 440/026/SOP/Diskes |
| Tanggal Pembuatan | : 12 Januari 2022 |
| Tanggal Revisi | : |
| Tanggal Pengesahan | : 12 Januari 2022 |
| Disahkan Oleh | : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis |
|  dr. ERSAN SAPUTRA.TH Pembina Utama Muda NIP. 19740220 200312 1 007 | |
| Nama SOP | : Pengumpulan Data Kinerja |
| Kualifikasi Pelaksan : | |
| Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 7. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. 12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 13. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 177/Kpts/1/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. | 1. Memahami peraturan perundangan yang terkait 2. Memahami sasaran dan capaian kinerja 3. Mengetahui tugas dan fungsi serta uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 5. Memahami Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda merupakan penjabaran dari RPJMD |
| Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 3. SOP Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 4. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) 5. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja | Peralatan/Perlengkapan : 1. Peraturan perundangan yang berlaku dan terkait dengan SAKIP 2. Data dan Informasi yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan 3. Alat tulis kantor 4. Komputer 5. Printer |
| Peringatan : Apabila tidak disusun dengan baik akan menghambat evaluasi kinerja sehingga SAKIP tidak berjalan dengan optimal | Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumentasi di Sub. Bagian Penyusunan Program |

Uraian Prosedur

| No | Kegiatan | Pelaksanaan | | | | Mutu Baku | | | |
|----|---|---|---|---|--|------------------------|---------------|------------------------|---|
| | | Kepala | Sekretaris | Perencana ahli Muda | Pengelola Program dan Laporan | Kelengkapan | Waktu (menit) | Output | Ket |
| 1 | Menugaskan Sekretaris untuk menyusun laporan |  | | | | Intruksi | 10 | Disposisi Kadis | |
| 2 | Sekretaris memfasilitasi rapat dengan Kabid, kasubag, Pejabat fungsional dalam Menyusun laporan | |  | | | Intruksi | 10 | Disposisi Kadis | Data Dari Bidang Teknis |
| 3 | Menugaskan perencana untuk memfasilitasi pengumpulan data pada semua pejabat eselon/fungsional dalam menyusun konsep laporan kinerja | | |  | | Disposisi Kadis | 30 | Disposisi Sekretaris | Data Dari Bidang Teknis |
| 4 | Mengumpulkan data dari semua pejabat eselon/fungsional melakukan verifikasi, mengolah, mengkonsep dan menugaskan staf untuk mengetik konsep laporan kinerja | | |  | | Data, Renstra, DPA | 840 | Konsep Laporan Kinerja | |
| 5 | Mengetik konsep dan menyerahkan konsep laporan kinerja | | | |  | Konsep Laporan Kinerja | 180 | Draft Laporan Kinerja | |
| 6 | Mengoreksi draft laporan kinerja dan menyerahkan kepada sekretaris | | |  | | Draft Laporan Kinerja | 60 | Draft Hasil koreksi | |
| 7 | Mengoreksi draft laporan kinerja dan menyerahkan pada Kepala Dinas | |  | | | Draft Hasil koreksi | 30 | Draft Hasil koreksi | |
| 8 | Menandatangani Laporan Kinerja |  | | | | Draft Hasil koreksi | 30 | Laporan kinerja | Laporan Kinerja diarsipkan, di kirim dan upload ke website dan link bagian Organisasi / Inspektorat dan Menpan RB |



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KESEHATAN

Jalan Pertanian No. - Telepon : 0766 - 8001006, website : diskes.bengkalis.go.id
BENGKALIS

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS**

NOMOR : 024/Kpts/I/2022

T E N T A N G :

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021 - 2026**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
2. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
7. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
13. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 177/Kpts/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal : 28 Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS**
dr. ERSAN SAPUTRA. TH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740220 200312 1 007

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
 Nomor Kesehatan Kabupaten Bengkalis
 Tanggal : 024/Kpts/I/2022
 : 28 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 d. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN | SATUAN | TARGET | | | | | | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---------------------------|--|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-----------------------------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 6 | 7 |
| | Angka Harapan Hidup (AHH) | Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. | Tahun | 71,36 | 71,55 | 71,71 | 71,86 | 72,03 | 71,2 | BPS | Dinas Kesehatan |
| Penigkatan Kualitas/Mutu Pelayanan Kesehatan dan pembiayaan kesehatan. | Angka Kematian Bayi (AKB) | Jumlah kematian bayi sampai dengan 11 bulan pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh bayi lahir hidup pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seribu kelahiran hidup. | Per - 1.000 KH | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3 | 2,8 | 2,5 | Bidang Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----------------|
| | Angka Kematian Balita (AKB) | Jumlah kematian balita sampai dengan 59 bulan pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh balita lahir hidup pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seribu kelahiran hidup. | Per - 100.000 KH | 3,7 | 3,4 | 3 | 2,7 | 2,4 | 2 | Bidang Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | Angka Kematian Neonatal | Jumlah kematian Neonatal sampai dengan 28 hari pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh bayi lahir hidup pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seribu kelahiran hidup. | Per - 100.000 KH | 3,2 | 3 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | Bidang Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | Angka Kematian Ibu (AKI) | Jumlah kematian ibu maternal pada satu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh bayi lahir hidup pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seratus ribu kelahiran hidup. | Per - 100.000 KH | 191 | 181 | 172 | 164 | 156 | 148 | Bidang Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | Persentase Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita | Jumlah balita kategori stunting (pendek/sangat pendek) dari hasil pengukuran tinggi badan per usia / Jumlah balita yang diperiksa dalam kurun waktu yang sama X 100%. | % | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | Bidang Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| Menurunnya kasus penyakit menular dan tidak menular | Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) | Angka seluruh kasus penyakit Demam Berdarah Dengue yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seratus ribu. | Per – 100.000 pddk | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Dinas Kesehatan |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------|------|------|------|------|------|---|-----------------|
| Angka kesakitan malaria | Angka seluruh kasus penyakit Malaria (Baru dan Lama) yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seribu penduduk. | Per – 1000 pddk | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Dinas Kesehatan |
| Angka kesembuhan penderita TB dan paru | Angka seluruh kasus penyakit TB Paru (Baru dan Lama) yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seratus ribu penduduk. | Angka | 376 | 414 | 456 | 546 | 546 | 546 | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Dinas Kesehatan |
| Prevalensi HIV | Angka seluruh kasus penyakit HIV/AIDS (Baru dan Lama) yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seratus persen. | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Dinas Kesehatan |


**KERALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS**
dr. ERSAN SAPUTRA. TH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740220 200312 1 007

DAFTAR HADIR

ACARA :

HARI :

TANGGAL :

| NO | NAMA | INSTANSI DAN JABATAN | TANDA TANGAN | |
|----|---------------------------------------|---|--------------|---------|
| 1 | dr. ERSAN SAPUTRA, TH | KEPALA DINAS KESEHATAN | 1..... | |
| 2 | Drs. H. AHMAD TOHA, MP | KABID YANKES | | 2..... |
| 3 | IRAWADI, SKM, MPH | KABID P2P | 3..... | |
| 4 | ISRIN, SKM | KABID SDK | | 4..... |
| 5 | YESSICA VEBRINA, SKM | KABID KESMAS | 5..... | |
| 6 | ABDUL MUTALIB, SKM | PERENCANA AHLI MUDA | | 6..... |
| 7 | ERMANTO, SKM | KASUBBAG KEU & PERLENGKAPAN | 7..... | |
| 8 | JAMALIA, SKM | KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN | | 8..... |
| 9 | EDI SUDARTO, SKM | SANITARIAN AHLI MUDA | 9..... | |
| 10 | ISMUNANDAR, SKM | EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MUDA | | 10..... |
| 11 | Hj. EVI ERWANTY, Amd. Keb | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 11..... | |
| 12 | EFRINA DEWI, SKM | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | | 12..... |
| 13 | RIMA SYAFMIAR, SKM | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 13..... | |
| 14 | ELIZA, S.Farm. Apt | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | | 14..... |
| 15 | DONA RISKHA MARYANTI, SKM | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 15..... | |
| 16 | Ns. POPI YULIA SANTISA, S.Kep., M.K.M | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | | 16..... |
| 17 | MIRNA JUNITA, S.Farm. Apt | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 17..... | |
| 18 | Ners. YUL EFNARITA, S.Kep | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | | 18..... |
| 19 | DEWI TRINI, SKM | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 19..... | |
| 20 | | | | 20..... |
| 21 | | | 21..... | |
| 22 | | | | 22..... |
| 23 | | | 23..... | |
| 24 | | | | 24..... |
| 25 | | | 25..... | |



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KESEHATAN

Jalan Pertanian No. - Telepon : 0766 - 8001006, website : disk.es.bengkalis.kab.go.id
BENGKALIS

NOTULEN


| | | |
|-----------------------|--|--|
| Nama Pertemuan | Pertemuan Evaluasi Peningkatan Kinerja Program | |
| | Tanggal : Februari 2022 Pukul : 08.30 WIB | Tempat : Ruang Rapat Lt.1 Dinas Kesehatan |
| Susunan Acara | <ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan2. Kata Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu3. Pembahasan Penilaian Kinerja4. Masukan serta saran inovatif untuk perbaikan kinerja.5. Penyusunan Rencana Perbaikan Kinerja/ RTL6. Penutup | |
| Notulen Sebelumnya | - | |
| Pembahasan | <ol style="list-style-type: none">1. Rencana kinerja dan upaya perbaikan berdasarkan Cakupan Indikator setiap program yang belum tercapai.2. Membuat rencana kegiatan tindak lanjut untuk upaya perbaikan.3. Diskusi antar lintas program dan lintas sektor mengenai rencana tindak lanjut guna upaya perbaikan kinerja serta menggali dan menampung saran, inovatif. Setiap pemegang program ikut aktif dalam diskusi tersebut.4. Kepala Dinas dan Seluruh staf serta pemegang program berkomitmen untuk meningkatkan kinerja program. | |
| Rencana Tindak Lanjut | Meningkatkan kinerja program dengan rencana tindak lanjut masing-masing program. | |
| Kesimpulan | Perlunya optimalisasi kegiatan dan komitmen Kepala Dinas serta Pengelola Program dalam meningkatkan capaian kinerja program. | |
| Rekomendasi | Perbaikan kinerja secara berkesinambungan. | |

Pimpinan Pertemuan
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu



dr. ERSAN SAPUTRA, TH
NIP. 19740220 200312 1 007

Bengkalis, Februari 2022
Notulen
Fungsional Perencana
Ahli Muda



ABDUL MUTALIB, SKM
NIP. 19690306 199101 1 001

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I-IV TAHUN 2021
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | | | | REALISASI S/D BULAN INI | % CAPAIAN | PERMASALAHAN | SOLUSI | |
|---------------|--|---|--------------|-----------|-------|-------|------|-------------------------|-----------|--|---|---|
| | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| KESMAS | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya | Jumlah Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali (K4) | 11971 | Orang | 2750 | 345 | 4806 | 3289 | 11,190 | 93.5 | - | - |
| 2 | | Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani | 2394 | Orang | 459 | 416 | 399 | 436 | 1,710 | 71.4 | - | - |
| 3 | | Jumlah puskesmas yang melaksanakan P4K sesuai standar | 18 | Puskesmas | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100 | - | - |
| 4 | | Jumlah puskesmas yang melaksanakan P4K sesuai standar (Kebutuhan Darah) | 18 | Puskesmas | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100 | - | - |
| | | Jumlah pertolongan persalinan difasilitas kesehatan | 11427 | Orang | 2405 | 2536 | 2646 | 2711 | 10,298 | 90.1 | - | - |
| | | Jumlah persalinan oleh nakes memiliki kompetensi kebidanan | 11427 | Orang | 2463 | 2600 | 2696 | 2,784 | 10,543 | 92.3 | - | - |
| | | Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 10883 | Orang | 2331 | 2510 | 2678 | 2684 | 10,203 | 93.8 | - | - |
| | | Jumlah anak balita mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 8 kali | 63761 | Orang | 4946 | 2407 | 4145 | 20,786 | 32,284 | 50.6 | - | - |
| | | Jumlah bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap | 11492 | Balita | 5446 | 0 | 0 | 0 | 5,446 | 47.4 | - | - |
| | | Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif Jumlah Posyandu aktif | 6015 | Balita | 219 | 219 | 0 | 4,854 | 5,292 | 88 | - | - |
| | | Balita dengan gizi kurang (kurus) | 327 | Balita | 20 | 60 | 0 | 0 | 80 | 24.5 | - | - |
| | | Jumlah anak balita yang mendapatkan pencegahan stunting sesuai standar | 300 | Balita | 79 | 79 | 71 | 71 | 300 | 100 | - | - |
| 8 | Jumlah balita gizi kurang (kurus) mendapat PMT | 85% | Balita | 513 | 831 | 583 | 504 | 2,431 | 286,000 | - | - | |
| 9 | Jumlah ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan | 80% | Ibu Hamil | 208 | 244 | 157 | 249 | 858 | 107,250 | - | - | |
| 10 | Jumlah kasus gizi buruk yang mendapat perawatan | 2 | Orang | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | - | - | |
| 11 | Jumlah anak didik kelas 1,2,3SD/MI diimunisasi | 42897 | Anak Sekolah | 0 | 21585 | 21312 | 0 | 42,897 | 100 | - | - | |
| 12 | Pemeriksaan kesehatan anak didik kelas 1, 7 dan 10 oleh tenaga kesehatan | 36876 | Orang | 0 | 0 | 27918 | 0 | 27,918 | 75.7 | Tidak semua anak ada android tuk pengisian google form dan kendala signal di daerah tertentu | Melakukan pendataan manual menggunakan form penjangkaran anak sekolah | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--------|----------------|-------|-------|------|--------|--------|-----|--|--|
| 13 | | Jumlah posyandu lansia aktif | 35157 | Puskesmas | 7280 | 3884 | 1604 | 16,140 | 28,908 | 82 | Belum melaksanakan Instrumen P3G Secara maksimal | akan ditingkatkan pelaksanaan instrumen P3G ditahun 2022 |
| 14 | | Jumlah desa siaga aktif | 124 | desa | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 100 | - | - |
| 15 | | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas | 18 | Puskesmas | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100 | - | - |
| 16 | | Penyebaran media informasi dan promosi kesehatan | 70 | Kali | 3 | 26 | 20 | 21 | 70 | 100 | - | - |
| 17 | | Puskesmas menerapkan K3 internal dan pemeriksaan kesehatan pekerja | 18 | Puskesmas | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 100 | - | - |
| 18 | | Puskesmas menyelenggarakan pembinaan kesehatan olahraga kelompok masyarakat | 18 | Puskesmas | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 100 | - | - |
| 19 | | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pemucuan SBS dan CTPS | 107 | Desa/Kelurahan | 40 | 20 | 22 | 25 | 107 | 100 | - | - |
| 20 | | Jumlah penduduk menggunakan jamban sehat | 518 | Jiwa | 0 | 518 | 0 | 0 | 518 | 100 | - | - |
| 22 | Persentase Fasilitas dan tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat izin | Jumlah kecamatan yang dilakukan studi EHRA | 11 | Kecamatan | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100 | - | - |
| | | Jumlah jasa tenaga kesehatan yang dibayarkan (Dokter PTT, Bidan PTT, dan Tenaga Kesehatan Lainnya) | 192 | Orang | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 22 | - | - |
| | Persentase Rumah tangga melaksanakanPHB | Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan PHBS | 123 | desa | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 100 | - | - |
| | | Jumlah rumah tangga ber PHBS dibina | 133563 | Ruta | 14869 | 20046 | 0 | 0 | 34,915 | 26 | - | - |
| | Persentase ketersediaan obat dan Vaksin diPuskesmas Sesuai peraturan | Jumlah sarana air minum (DAM) memenuhi syarat kesehatan | 59 | DAM | 5 | 15 | 21 | 5 | 46 | 78 | - | - |
| | | Jumlah tempat pengelola makanan dan minuman memenuhi syarat kesehatan | 358 | TPM/IRTP | 25 | 112 | 143 | 52 | 332 | 93 | - | - |
| YANKES | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya | Terlaksananya Manejemen Puskesmas Sesuai Standar Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas DTPK | 18 | Puskesmas | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 100 | - | - |
| | | Jumlah Rumah Sakit memberikan pelayanan sesuai dengan standar | 6 | Rumah Sakit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|---|---|
| | | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap memberikan pelayanan sesuai dengan standar (BLUD) Puskesmas BLUD | 455501 | Orang | 114400 | 115325 | 113235 | 112541 | 455,501 | 100 | Belum semua Puskesmas yang memberikan rincian kebutuhan dana operasional puskesmas | Perlu dilakukan Sosialisasi agar penggunaan dana tepat sasaran dan tepat penggunaan |
| | | Puskesmas terakreditasi | 18 | Puskesmas | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 100 | Pandemi belum dinyatakan dicabut oleh pemerintah, maka kegiatan Survei untuk mendukung pelaksanaan akreditasi belum bisa dilaksanakan | Tahun 2022, jika Pandemi dinyatakan berakhir maka kegiatan Pendampingan dan Survei akreditasi bisa dilaksanakan |
| 2 | | Jumlah kelompok kesehatan tradisional yang dibina di Puskesmas | 18 | Puskesmas | 3 | 5 | 4 | 6 | 18 | 100 | Masih belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Kelompok TOGA dan pengobatan tradisional | Perlunya Bimbingan, Monitoring dan Evaluasi secara berkesinambungan |
| 3 | | Jumlah pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan | 11,446 | Orang | 2405 | 2536 | 2646 | 2,711 | 10,298 | 90 | - | - |
| 4 | | Jumlah peserta BPJS Non Kapitasi yang dilayani | 812 | Orang | 221 | 210 | 182 | 199 | 812 | 100 | - | - |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Jumlah peserta Jamkesmasda integrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jumlah peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan di FKTP | 234,709 | Jiwa | 58603 | 58701 | 58745 | 58660 | 234,709 | 100 | - | - |
| 8 | | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan jaminan pelayanan kesehatan | 18 | Puskesmas | 3 | 5 | 4 | 6 | 18 | 100 | - | - |
| 9 | SDK | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Fasilitas dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat izin | Jumlah rekomendasi perizinan yang ditetapkan untuk sarana kesehatan | 50 | Unit | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 | 100 | Dalam pelaksanaan di lapangan masih ada sarana yang tidak memiliki izin usaha | di lapangan sudah diberi pengarahannya agar segera membuat izin agar adanya legalitas dari usaha yang mereka jalankan |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|
| | Jumlah rekomendasi perizinan yang ditetapkan untuk tenaga dan sarana kesehatan | 585 | Orang | 125 | 230 | 110 | 120 | 585 | 100 | dalam memberikan rekomendasi tidak mengalami masalah | kegiatan pemberian rekomendasi tenaga kesehatan tidak mengalami kendala yang berarti |
| | Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan yang disusun sesuai standar | 9 | Jenis | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 100 | kegiatan berjalan sesuai arahan dari kementerian | diharapkan banyak peminat tenaga kesehatan dalam mengikuti seleksi Nusantara Sehat (NS) |
| | Jumlah ASN yang dilakukan penilaian Kinerja | 25 | ASN | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | 100 | Kegiatan Penghargaan Teladan tidak dapat dilaksanakan, hanya perjalanan dinas ke provinsi yang bisa dilakukan untuk sosialisasi..Selain itu adanya rasionisasi anggaran | harapan kegiatan penghargaan tenaga teladan tahun depan dapat dilaksanakan. |
| | Jumlah tenaga kesehatan memperoleh penghargaan terbaik dan teladan | 25 | Orang | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | 100 | Kegiatan Penghargaan Teladan tidak dapat dilaksanakan, hal ini dari kementerian juga tidak melaksanakan kegiatan penghargaan teladan ini. Selain itu adanya rasionisasi anggaran | harapan kegiatan penghargaan tenaga teladan tahun depan dapat dilaksanakan. |
| | Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi | 60 | ASN | 56 | 2 | 1 | 1 | 60 | 100 | Kegiatan Pelaksanaan UKOM dilaksanaka pada bulan maret di dinas kesehatan dan tidak mengalami kendala | dalam kegiatan pelaksanaan ukom sudah berjalan lancar. |
| Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai peraturan | Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar | 18 | Puskesmas | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 100 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|----------|----|----|----|-----|-----|-----|--|--|
| | Jumlah Puskesmas, toko obat, apotek, toko bahan makanan dan swalayan yang mendapatkan pengawasan | 105 | Unit | 21 | 21 | 21 | 25 | 88 | 84 | untuk sarana toko obat di wilayah pinggir banyak yang sudah mati izinnya namun tidak melapor ke dinas kesehatan. Sehingga data tidak valid | melakukan updating data perwilayah kerja puskesmas baik manual dan secara sistem oss bagi yang telah melakukan pengurusan izin melalui oss |
| Persentase Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya | Jumlah jenis obat yang tersedia dipuskesmas | 208 | Unit | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 100 | pagu masing2 obat dan bmhp terkunci di DPA | tahun 2022 di input secara gelondongan untuk subkegiatan pengadaan obat vaksin |
| | Jumlah bangunan pendukung gedung kantor | 1 | Unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | - | - |
| | Jumlah pembangunan baru dan renovasi/rehabilitasi Puskesmas | 16 | Unit | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100 | - | - |
| | Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas | 5 | Unit | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | - | - |
| | jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan Kec. Batin Solapan | 6 | Unit | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | - | - |
| | jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan Kec. Bukit Batu dan Bandar Laksamana | 4 | Unit | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | - | - |
| | jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan Kec. Mandau | 3 | Unit | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | - | - |
| | jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan Kec. Pinggir | 3 | Unit | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | - | - |
| | jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan Kec. Rupal | 3 | Unit | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | - | - |
| | jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan Kec. Rupal Utara | 3 | Unit | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | - | - |
| | jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan Kec. Siak Kecil | 4 | Unit | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | - | - |
| | jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan Kec. Tualang Mandau | 3 | Unit | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | - | - |
| | Jumlah ketersediaan tanah bangunan kesehatan | 0 | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Jumlah pengadaan peralatan dan BMHP pengendalian penyakit | 502 | Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 502 | 502 | 100 | - | - |
| | Jumlah peralatan kesehatan di Puskesmas sesuai standar | 553 | Set | 0 | 0 | 0 | 553 | 553 | 100 | - | - |

| P2P | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--|---|
| | Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 37 | Kasus | 13 | 10 | 3 | 11 | 37 | 100 | - | - |
| | Penenderita kasus gigitan HPR mendapat Vaksin | 169 | kasus | 53 | 44 | 30 | 42 | 169 | 100 | - | - |
| | Jumlah ibu hamil yang di screening | 10306 | orang | 2232 | 1636 | 1628 | 1909 | 7,405 | 71.9 | Masih banyak ibu hamil melakukan pemeriksaan di klinik/dokter praktker swasta yang tidak dilakukan pemeriksaan scrining HIV | semua Klinik dan Praktek Dokter swasta yang melakukan pemeriksaan ibu hamil dilatih untuk bisa melakukan Skrining HIV |
| | Jumlah pemeriksaan IVA dan Payudara perempuan usia 30 -50 tahun | 90578 | orang | 669 | 879 | 1065 | 1359 | 3,972 | 4.39 | Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan khususnya pemeriksaan kanker leher rahim dan masih adanya rasa malu,tabu dilingkungan masyarakat | Edukasi, Penyuluhan perorangan melalui lembar balik disetiap Fasyankes |
| | Jumlah pemeriksaan mikrofilaria pada anak sekolah SD kelas 1 dan 3 | 0 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak ada pemeriksaan spesimen Tahun 2022 dikarenakan kegiatan TAS 2 diundur karena Pandemi Covi19 | menunggu komfirmasi kementerian kesehatan untuk rencana TAS 2 Kabupaten Bengkalis |
| | Jumlah penderita baru kusta tanpa cacat ditemukan | 4 | Kasus | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 100 | masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan kasus penderita kusta | melakukan pelacakan kasus kusta |
| | Jumlah penderita diare pada balita yang diobati | 6181 | orang | 461 | 450 | 459 | 522 | 1,892 | 30.6 | terbatas nya ketersediaan zinc dan oraril di puskesmas | penambahan pengobatan zinc oralit |
| | Jumlah penderita pneumoni pada balita yang diobati | 630 | Balita | 21 | 17 | 31 | 24 | 93 | 14.76 | Pelaporan belum dilaksanakan 1 pintu sehingga masih ada kasus kasus yang tidak tercatat | Fasyankes mengatur pelaporan 1 pintu sehingga semua kasus dapat dilaporkan dengan baik |
| | Penemuan dan penanganan penderita baru TB Paru BTA Positif | 612 | orang | 191 | 161 | 128 | 223 | 703 | 114.87 | - | - |
| | Penderita baru HIV AIDS ditemukan dan minum obat | 1898 | orang | 9 | 10 | 5 | 10 | 34 | 1.79 | Selama Pandemi Covid 19 kegiatan ke kelompok resiko HIV terjadi penurunan | Segera mengkonseling terhadap kasus yang belum minum obat untuk segera minum obat |
| | Penderita diabetes melitus usia > 15 yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 7,804 | Orang | 2,291 | 2,432 | 2,112 | 4,490 | 11,325 | 145.1 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|------|---|---|
| | Penderita hipertensi usia >15 Tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 118,620 | Orang | 6,127 | 6,808 | 7,765 | 34,442 | 55,142 | 46.5 | Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan dan melakukan cek kesehatan hanya disaat sakit ke fasyankes | Fasyankes terdekat melakukan Home Visit untuk Pemeriksaan Hipertensi, meningkatkan peran Posbindu di setiap desa yang ada di Kabupaten Bengkalis. |
| | Jumlah Jemaah Calon Haji yang diperiksa kesehatannya selama 3 bulan | 470 | JCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kabupaten Bengkalis tidak menjalankan ibadah haji di karenakan Pandemi Covid | Memutuskan mata rantai Penularan Covid-19 |
| | Jumlah kasus Positif AFP yang ditemukan | 3 | Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kurang maksimalnya pelacakan kasus AFP dikarenakan Pandemi Covid | Memutuskan mata rantai Penularan Covid-19 |
| | Pemeriksaan spesimen campak yang ditemukan positif campak | 1 | Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Penanganan kasus KLB kurang dari 24 jam | 2 | kasus | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100 | - | - |
| | Jumlah Puskesmas mampu melaksanakan upaya kesehatan jiwa dan Napza | 18 | Puskesmas | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100 | - | - |

Bengkalis, 26 Agustus 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS



dr. ERSAN SAPUTRA, TH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740220 200312 1 007